



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA MUNGKID

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. MUHROJI
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
3. NHK : 444661

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 90.999.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.129 m²/150 m² di MAGELANG, WARISAN Rp. 30.240.000
2. Tanah Seluas 706 m² di MAGELANG, WARISAN Rp. 37.566.000
3. Tanah Seluas 459 m² di MAGELANG, Rp. 12.393.000
4. Tanah Seluas 413 m² di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 10.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 33.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2008, Rp. 8.000.000
2. MOTOR, SUZUKI Satria FU SEPEDA MOTOR Tahun 2012, Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2015, Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 123.999.000

III. HUTANG Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 73.999.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Oktober 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.